

ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

Muhammad Adrian Perdana

Politeknik Pengadaan Nasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2024

Revised Oktober 2024

Accepted Oktober 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

adrianperdana27@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, laut, hingga sektor pertambangan dan migas. Potensi ini, jika dikelola dengan kebijakan ekonomi yang tepat, berpeluang besar mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, realita menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas tertentu, seperti garam dan beras. Misalnya, data dari Kementerian Perdagangan tahun 2015 menunjukkan impor garam mencapai 1,51 juta ton, sementara di sektor beras, pemerintah mengimpor ratusan ribu ton beras tiap tahun untuk menjaga stabilitas harga. Kondisi ini mengindikasikan kelemahan dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan memanfaatkan sumber

daya domestik secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi politik Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor melalui pendekatan teori kebijakan publik.

Kata Kunci : Sumber Daya Alam, Kebijakan Impor, Ekonomi Politik

Abstract

Indonesia is a developing country with abundant natural resources, including agriculture, plantations, marine products, as well as mining and oil and gas sectors. This potential, if managed with appropriate economic policies, holds significant promise for supporting national welfare. However, Indonesia remains dependent on imports for certain commodities, such as salt and rice. For instance, data from the Ministry of Trade in 2015 showed that salt imports reached 1.51 million tons, while hundreds of thousands of tons of rice are imported each year to stabilize prices. This situation highlights weaknesses in economic policies aimed at optimizing domestic resources. This study seeks to analyze Indonesia's economic policy in natural resource management, focusing on the government's efforts to reduce import dependency through the lens of public policy theory.

Keywords: *Natural Resources, Import Policy, Political Economy.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang sedang memasuki level negara maju, Indonesia juga merupakan negara yang subur yang memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari hasil pertanian, hasil perkebunan serta dari hasil lautnya. Selain itu Indonesia juga kaya akan Kekayaan disektor pertambangan, disektor migas, disektor kehutanan, bila dikelola oleh negara dengan benar maka akan membuat negara Indonesia menjadi negara yang paling kaya dan makmur.

Bayangkan betapa besar potensi negeri kita. Indonesia adalah negara tropik subur dengan letak strategis dan kawasan sangat luas: 1,3 % dari muka bumi, 17 ribu pulau, 81 ribu km garis pantai terpanjang dunia, 317 juta hektar luas lautan, dan 191 juta hektar luas daratan. Kekayaan sumber daya alam mineral mencakup 60 cekungan migas, 77 milyar barel minyak (senilai sekitar 77 juta miliar rupiah, atau setiap warga Indonesia yang 220 juta orang akan mendapat 350 juta rupiah/orang), 332 triliun kaki kubik gas (senilai sekitar 50 juta triliun rupiah, atau setiap warga Indonesia bisa mendapat 220 milyar rupiah/orang).

Indonesia juga sebagai pemasok kebutuhan dunia mencakup 25 % timah (110.000 ton/th atau $\frac{1}{4}$ produksi dunia), 2,2 % batubara terbesar 10 dunia, 7,2 % emas (terbesar no. 6 dunia, 143,2 ribu kg), 5,7 % nikel (terbesar no. 3 dunia, 150 ribu ton), produsen gas terbesar se-Asia Oceania, 20 besar negara penghasil minyak mentah dunia, produsen bauksit no. 7 dunia (7 juta ton), produsen tembaga no. 2 dunia (1,06 juta ton), produsen perak no. 11 dunia (328,7 ribu kg), dan tambang lainnya. Kekayaan sumber daya alam terbaharui mencakup 800 spesies tanaman pangan, 1000 spesies tanaman obat-obatan, dengan kekayaan hayati daratan terbesar kedua dunia dan terbesar pertama dunia bila digabung kekayaan laut. Tercatat bahwa Indonesia adalah penghasil biji-bijian terbesar no. 6 dunia, penghasil teh terbesar no. 6 dunia, penghasil kopi no. 4 dunia, penghasil coklat no. 3 dunia, penghasil minyak sawit (CPO) no. 2 dunia, penghasil lada putih no. 1 dunia, lada hitam no. 2 dunia, penghasil puli dari buah pala no. 1 dunia, penghasil karet alam no. 2 dunia, penghasil karet sintetis no. 4 dunia, penghasil kayu lapis no. 1 dunia, penghasil ikan no. 6 dunia.

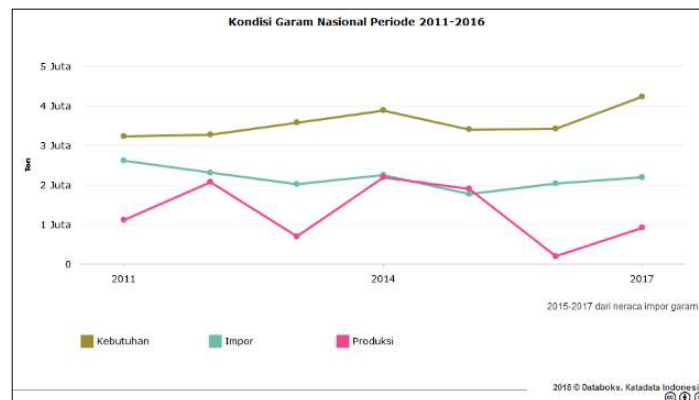
Belum lagi pluralitas kekayaan budaya Bangsa yang harus dijamin keberadaannya: 350 bahasa, beratus suku dan etnis, agama dan kepercayaan lokal, adat istiadat, beragam warna kulit dan jenis rambut, yang tersebar di 3 jenis waktu, begitu indah begitu kaya. Semua kekayaan ini sesungguhnya adalah milik rakyat di mana rakyat tersebut hidup di dalam suatu wilayah tempat sumber daya alam tersebut berada. Konstitusi UUD 1945 pasal 33 menjamin bahwa "Seluruh Sumber Daya Alam dan Cabang -cabang Produksinya yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dikuasai Negara dan Digunakan Sebesar- besarnya untuk Kesejahteraan Rakyat."

Maka dengan kekayaan negara Indonesia yang begitu melimpah ruah ini sudah sepantasnya menjadi kewajiban pemerintah untuk mengelola sebaik-baiknya aset yang sangat baik ini guna untuk kesejahteraan masyarakat dalam bingkai ekonomi politik. Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang konsisten dan strategis terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam bidang ekspor dan impor terhadap hasil kekayaan alam Indonesia ini.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970: 71) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu, sedangkan Thomas R. Dye (2011: 1) *public policy is "whatever governments choose to do or not to do. Public policy is what governments do, why they do it, dan what difference it makes.*

Namun ternyata hari ini dapat dilihat Indonesia masih belum mampu membuat kebijakan yang baik guna mengelola hasil bumi yang begitu kaya ini, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, hingga akhir Juni 2015 tercatat Indonesia sudah mengimpor garam sebanyak 1,51 juta ton. Dari jumlah tersebut, 04,475 ton garam diimpor industri CAP, 681 ribu ton oleh industri farmasi dan 77 ribu ton oleh industri lain.

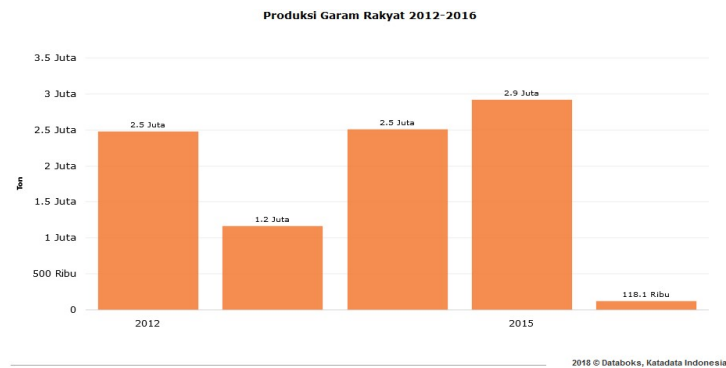
Padahal jika merujuk pada sebuah artikel yang berjudul "Development of Traditional Salt Production Process for Improving Product Quantity and Quality in Jepara District, Central Java, Indonesia" yang diterbitkan Elsevier pada tahun 2014 menjelaskan di Kedung, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, proses produksi garam tradisional telah dimodifikasi. Modifikasi tersebut meningkatkan kuantitas produk garam dari 70.000 kg / tahun / ha untuk 117.500 kg / tahun / ha. Kemurnian produk garam (NaCl) meningkat dari 90% menjadi 98,4%. Di tahun sebelumnya Indonesia juga mengimpor garam sebanyak 2,25 juta ton, berasal dari Australia 1,5 juta ton, India 235.624 juta ton, China 24.349 juta ton, Selandia Baru 1.656 ton, Denmark 281,5 ton dan Belanda sebanyak 268,2 ton.



Sumber: Katadata.co.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2011 hingga tahun 2017 kebutuhan akan garam Indonesia diselalu bisa dipenuhi dengan tingkat produksi garam dalam negeri dan hal ini berimplikasi kepada impor garam yang dilakukan oleh pemerintah yang ternyata aktivitas impor garam malah semakin tinggi. Impor akan dilakukan oleh PT Garam, Badan Usaha Milik Negara di bidang produksi garam. Rencananya, garam impor ini akan dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar domestik. Saat ini, harga rata-rata garam mencapai Rp 1,4-1,5 juta per ton. Harga ini jauh di atas harga rata-rata pada kondisi normal, yakni sebesar Rp 400.000 per ton.

Sejak 2011, tingginya kebutuhan garam nasional belum bisa ditopang oleh produksi garam dalam negeri. Bahkan, pada 2016, produksi garam nasional jatuh ke posisi terendah, yakni 200 ribu ton. Pemerintah mengklaim hal ini dilakukan karena tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan produksi garam dalam negeri turun.



Sumber: Katadata.co.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi garam dari tahun 2013 hingga pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang baik namun pada tahun 2016 produksi garam nasional mengalami penurunan yang sangat parah, yang pada awalnya produksi garam tahun 2015 sebanyak 2,9 juta ton meroket turun pada tahun 2016 yakni sebanyak 118,1 ribu ton saja. Anjloknya produksi garam nasional karena poduksi garam di sentra-sentra garam menyusut tajam.

Produksi garam rakyat di Cirebon pada 2016 anjlok lebih dari 99 persen menjadi 591ton dari tahun sebelumnya 435 ribu ton, produksi garam di Sampang juga menyusut tajam lebih dari 98 persen menjadi tujuh ribu ton dari tahun sebelumnya 399 ribu ton. Kemudian Pati, produksi garamnya pada 2016 turun 98 persen menjadi enam ribu ton dari tahun sebelumnya 382 ton, Indramayu juga anjlok 98 persen menjadi 6 ribu ton dari sebelumnya 317 juta ton, dan Sumenep juga turun 96 persen menjadi 10 ribu ton dari sebelumnya 236 ribu ton. Rasanya sangat disayangkan jika negara Indonesia yang berjuduk negara maritim harus impor garam dengan dalih pemerintah intensitas curah hujan yang meningkat. Tak hanya sampai disitu, negara Indonesia yang juga berjuduk negara agraria ini ternyata juga terjadi impor pada sektor beras.

Dikutip dari laman metrotvnews.com, Indonesia tak lama lagi bakal diguyur 500 ribu ton beras impor dari Vietnam dan Thailand. Pembukaan keran impor beras dilakukan pemerintah untuk menutup kekurangan pasokan beras sekaligus menjaga lonjakan harga beras di pasaran. Harapannya stabilitas harga bisa terjadi dan tidak memberikan beban ke masyarakat. Pengamat Pertanian dari Insitut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso pun mempertanyakan kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir dalam rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand itu. Dirinya menilai PPI

tidak memiliki wewenang sekaligus infrastruktur memadai untuk menjalankan impor beras demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan Perum Bulog sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga beras kualitas medium pada Jumat, 12 Januari 2018 tercatat sebesar Rp11.500 per kg. Harga itu jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp9.450 per kg.

Dari neraca diatas dapat dilihat bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia meningkat ditahun 2016 meskipun ditahun berikutnya yakni 2017 kembali turun, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras Indonesia sepanjang triwulan pertama 2018 mencapai 384 tibu ton dengan nilai US\$ 180,62 juta. Jumlah tersebut terdiri atas impor di Januari sebanyak 13 ribu ton, Februari 273 ribu ton dan Maret 98 ribu ton. Mundurnya panen raya padi serta turunnya stok beras dalam negeri membuat pemerintah melakukan impor beras untuk stabelisasi harga beras lokal. Impor beras dalam tiga bulan pertama tahun ini jauh lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya seberat 46 ribu ton, namun lebih rendah dibanding triwulan I 2016 yang mencapai 982 ribu ton. Impor beras sepanjang triwulan I 2018 juga lebih besar dibanding akumulasi impor beras sepanjang tahun lalu yang hanya mencapai 305 ribu ton.

Jika dihitung ada kerugian anggaran sebesar Rp5,55 juta untuk selisih Rp5.550 per kg bila dikalikan 1.000 ton. Untuk 500 ribu ton, pemerintah harus menanggung selisih sebanyak Rp2,75 triliun. Namun, Mendag tak menyoal karena pemerintah enggan mengambil risiko atas minimnya pasokan beras khusus yang mengakibatkan melonjaknya harga. Terlepas dari dalih pemerintah yang mengatakan jika impor garam terjadi akibat curah hujan yang semakin meningkat dan berkelanjutan yang menyebabkan pemerintah harus melakukan impor garam, ataupun panen raya dan stok beras dalam negeri yang mengalami penurunan dan untuk menstabilkan harga beras dalam negeri maka pemerintah melaksanakan impor beras, tetap saja hal ini tidak bisa menjadi pilihan terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Sisi negatif yang akan bisa terjadi adalah daya saing produsen dan produksi dalam negeri mengalami penurunan, negara asing semakin kuat, semakin lemahnya sumber daya manusia dan sumber daya alam dan yang menakutkan adalah ketergantungan Indonesia akan terus berlanjut terhadap impor serta kesejahteraan petani garam dan beras menurun.

B. KAJIAN TEORI

Dalam kajian ekonomi politik, pendekatan merkantilisme merupakan salah satu teori klasik yang memiliki pengaruh signifikan, terutama pada abad ke-16 hingga ke-18. Merkantilisme, sebagai teori ekonomi, menekankan pada akumulasi kekayaan negara melalui pengendalian perdagangan luar negeri dan peningkatan surplus perdagangan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kekayaan dunia bersifat terbatas, sehingga negara-negara harus berkompetisi untuk memaksimalkan kekayaan melalui ekspor yang lebih tinggi daripada impor.

Dasar Merkantilisme

Merkantilisme menekankan bahwa kekuatan negara ditentukan oleh kekayaan yang dimilikinya, yang terutama diwujudkan dalam bentuk cadangan emas dan perak. Dalam konteks ini, merkantilisme menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan peningkatan ekspor dan membatasi impor guna memastikan aliran kekayaan yang masuk lebih besar dibandingkan yang keluar. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi merkantilistik cenderung proteksionis, mengandalkan tarif tinggi untuk barang impor dan dukungan subsidi bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang ekspor.

Ekonomi Politik Nasionalisme Ekonomi

Merkantilisme sering kali diasosiasikan dengan nasionalisme ekonomi, di mana kepentingan negara berada di atas kepentingan individu atau sektor swasta. Pendekatan ini meyakini bahwa ekonomi nasional harus direncanakan sedemikian rupa agar negara dapat menjadi mandiri dan kompetitif di kancah internasional. Hal ini diwujudkan melalui intervensi negara di berbagai sektor ekonomi dan kontrol ketat terhadap perdagangan internasional. Dengan demikian, pendekatan merkantilistik mendukung pengaturan ekonomi yang memperkuat posisi negara dalam persaingan global.

Peran Negara dan Campur Tangan Pemerintah

Dalam kerangka teori merkantilisme, negara memiliki peran sentral sebagai aktor ekonomi utama yang harus mengendalikan berbagai aspek ekonomi guna memaksimalkan kesejahteraan nasional. Intervensi negara dapat berupa pemberian monopoli kepada perusahaan-perusahaan tertentu, kebijakan proteksionis, serta dukungan terhadap sektor-sektor strategis. Dengan mengontrol perdagangan luar negeri, negara diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung kepentingan nasional.

Persaingan dan Konflik Antar Negara

Merkantilisme menekankan bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat zero-sum game, di mana keuntungan suatu negara sering kali dihasilkan dari kerugian negara lain. Teori ini melihat perdagangan internasional sebagai arena kompetisi antar negara untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan cenderung memicu konflik, terutama dalam hal monopoli perdagangan dan penjajahan, di mana negara-negara Eropa pada masa itu bersaing untuk menguasai sumber daya alam di luar negeri.

Kritik terhadap Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Modern

Meskipun merkantilisme memainkan peran penting dalam pembentukan negara-negara modern, pendekatan ini mendapat kritik dari berbagai pemikir ekonomi modern. Para kritikus, terutama kaum liberal, menganggap bahwa proteksionisme yang berlebihan dapat menghambat efisiensi ekonomi dan inovasi. Dalam ekonomi global yang lebih terbuka, teori ini dianggap kurang relevan karena tidak memperhitungkan saling ketergantungan ekonomi antar negara.

Pendekatan merkantilisme dalam ekonomi politik menawarkan wawasan penting mengenai bagaimana negara dapat menggunakan instrumen kebijakan ekonomi untuk memperkuat kekuasaannya di dunia internasional. Meski banyak dari prinsip-prinsipnya sudah tidak relevan dalam konteks globalisasi saat ini, pendekatan ini tetap menjadi referensi penting dalam memahami kebijakan ekonomi proteksionis yang muncul dalam bentuk-bentuk baru, seperti ekonomi nasionalisme atau neo-merkantilisme.

C. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yakni tinjauan literatur komprehensif (literature review). Studi ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terbaru dan relevan dalam ranah teknik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber-sumber penelitian yang relevan akan ditemukan melalui basis data akademis seperti Buku, Google Scholar, Website resmi milik pemerintah, serta Digital Library. Analisis literatur akan mencakup identifikasi tren, tema utama, dan perkembangan terbaru dalam bidang ini. URL dari situs web basis data ini akan digunakan untuk mengakses dan mengunduh sumber-sumber yang relevan. (Rahadian Zainul:2023)

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji dampak kebijakan anti-korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru. Literatur review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan dari berbagai studi yang relevan, baik dari konteks lokal maupun internasional. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan di Pekanbaru dengan membandingkannya dengan best practices yang ada di literatur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi dan politik akan berpengaruh pada kebijakan yang dibuat dan kebijakan publik-pun akan outputnya akan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan politik di Indonesia, dosen pascasarjana fisip UR Dr. Khairul Anwar M.Si pada kuliahnya mengatakan “ *kebijakan bukan soal keputusan, program, aturan-aturan ataupun lainnya melainkan lebih luas dari itu kebijakan tentang Kebijakan dan Kebijaksanaan pemerintah dan elit politik, ketika ada suatu kebijakan yang tidak berjalan terkadang itu bukan salah kebijakan itu sendiri tapi apakah memang kebijakan itu pada dasarnya dibuat untuk menjawab masalah atau malah tidak maka oleh sebab itu untuk mengetahuinya harus melihat pada kebijakan induk serta ekonomi dan politik*”.

Adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ($\pm$ 81.000 km) menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Disamping itu hal ini juga terjadi pada beras di Indonesia, saat ini

terjadi lonjakan harga di pasar umum untuk kualitas beras medium. Namun anehnya pemerintah melakukan impor untuk beras kualitas khusus, di mana untuk kategori kelas ini harga beras relatif stabil dan tidak fluktuatif.

Untuk itu sebaiknya pemerintah memperkuat kelembagaan Perum Bulog, dan jika ada masalah selesaikan persoalannya. Bukan malah pindah ke pihak lain, dan menyisakan masalah. Saat ini petani sedang menikmati harga jual gabah yang baik. Bahkan di beberapa daerah harga gabah nol gabuk di tingkat petani bisa mencapai Rp 6.000/Kg. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga awal Februari. Namun, kenaikan harga di tingkat petani ini bukan serta merta bonus bagi petani.

Harga ini merupakan kompensasi dari pengeluaran untuk sarana produksi (pestisida) yang dilakukan oleh petani. Pada musim ini petani mengeluarkan pembelian pestisida lebih banyak dibandingkan musim sebelumnya. Karena cuaca seperti ini mengakibatkan terjadinya serangan hama penyakit tanaman. Dengan demikian impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini cenderung merugikan petani. Kebijakan impor beras ini akan mendorong spekulasi dan pedagang gabah menurunkan harga pembelian gabah petani.

Untuk itu kita berharap pemerintah menunda impor beras yang pelaksanaannya hampir bersamaan dengan waktu panen raya. Sebaliknya pemerintah menjamin petani bisa menikmati keuntungan dalam menanam padi. Memastikan petani menerima harga pembelian gabah yang layak. Jika kondisi ini terwujud maka petani akan tetap antusias menanam padi.

Dari permasalahan ini Indonesia terkesan lemah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan negara yang melimpah serta lemah dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki ataupun memaksimalkan produsen-produsen dalam negeri, padahal sebagai negara berkembang Indonesia harus bisa memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki, kekuasaan sendiri dimaknai sebagai kemampuan seseorang ataupun suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku tersebut.

Jika dinilai dari pengertian ini jelas Indonesia seperti dikuasai oleh negara asing akibat kelemahan dalam negeri dalam memaksimalkan potensi SDA yang dimilikinya. Untuk negara yang sedang berkembang apalagi negara yang makmur seperti Indonesia ini, sebaiknya memang memaksimalkan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat kebijakan ekonomi yang nasionalis, dalam kajian ekonomi politik ada satu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan ekonomi politik berpusat-negara.

Pendekatan ini berkembang dari merkantilisme, merkantilisme sendiri adalah sebuah filsafat ekonomi yang menganggap negara sebagai pelaku ekonomi yang paling signifikan, memperlihatkan sejauh mana hubungan ekonomi ditentukan oleh kekuasaan politik. Pendekatan ini terkadang disebut “nasionalisme ekonomi” yang paling berpengaruh di Eropa mulai dari abad 15 hingga akhir abad ke 17. Dalam pandangan ini, pasar pasar ekonomi tidak bersifat alami, tetapi eksis didalam sebuah konteks sosial yang sebagian besar dibentuk oleh penyelenggara kekuasaan negara. Strategi merkantilisme klasik adalah membangun dan meningkatkan kesejahteraan, kekuatan dan gengsi negara dengan membangun perimbangan

perdagangan yang lebih menguntungkan dengan memproduksi barang-barang untuk ekspor sekaligus mempertahankan tingkat impor yang rendah.

Menurut penulis strategi kebijakan ekonomi untuk negara berkembang seperti Indonesia ini tentunya pada berkaca pada pendekatan ekonomi merkantilisme ini, pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih mengutamakan nasionalis ketimbang membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya pasar bebas. Indonesia bukannya tidak bisa memasuki pasar bebas, namun dengan kondisi yang seperti ini malah akan menyebabkan negara ini semakin lemah.

Pendekatan ekonomi berpusat pada negara ini tentunya bisa dijadikan landasan dalam membuat kebijakan dan mengelola kekayaan negara Indonesia yang harus dilakukan dengan cara memaksimalkan produksi garam dan beras dalam negeri dengan memberi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh petani, serta yang paling penting adalah nasionanalisis aset yang sempat dikontrak atau dikelola oleh asing.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas maka menulis dapat menarik kesimpulan bahwa, terlepas dari alasan pemerintah yang mengatakan impor garam terjadi akibat curah hujan yang meningkat tiap bulannya dan impor beras terjadi akibat produksi panen raya menurun tetap saja impor bukan satu-satunya jalan terakhir, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang begitu luas dan memiliki garis pantai yang panjang dan apakah semua itu diguyur hujan, dan apakah tanah yang terhampar luas dan subur menyebabkan panen beras menurun? Tentu tidak. Maka ini merupakan maslah ekonomi politik yang mesti harus segera diselesaikan oleh Negara ini dan dengan bertumpu pada pendekatan ekonomi merkantilisme atau ekomomi berpusat pada negara atau nasionalis ekonomi maka negara ini bisa membuat kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan negara ini.

REFERENSI

- Budiardjo Miriam. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho Riant. (2015). Policy Making. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Heywood Andrew. (2013). Politik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Zainul, R (2023). Penelitian-Penelitian Dari Ranah Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK) 1-5. UP
- Databoks, (2016). Produksi dan Impor Garam 2009-2013. Diakses dalam <https://databoks.katadata.co.id/kelautan/statistik/57dad5fd0c2a313/produksi-dan-impor-garam-2009-2013>
- Gita Nur Aisyah (2023). Indonesia Adalah Negeri Yang Subur Dengan Sumber Daya Alam Darat Dan Lautan Yang Begitu Kaya Raya. Diakses dalam <https://id.scribd.com/doc/225467192/Indonesia-Adalah-Negeri-Yang-Subur-Dengan-Sumber-Daya-Alam-Darat-Dan-Lautan-Yang-Begitu-Kaya-Raya>